

Partisipasi Masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan

Oleh:

¹ Beatus Tambaip; ²Paul Adryani Moento; ³ Alexander Phuk Tjilen

¹³Program Studi Administrasi Publik Program Magister, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Musamus

². Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Musamus

Email. paulmoento@unmus.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Partisipasi Masyarakat Kampung Getentiri, Distrik Jair, Kabupaten Boven Digoel dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan. Untuk mencapai tujuan penelitian digunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi dalam kegiatan pengumpulan data. Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif-kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kelompok Non Partisipasi bahwa meskipun Musrembang telah dilakukan dan memberikan antusiasme kepada sebagian besar masyarakat Kampung Getentiri yang mayoritas sebagai petani, namun partisipasi masyarakat dalam kegiatan Musrembang masih kurang. Hubungan antar masyarakat kurang komunikatif dan belum terlihat keaktifan dalam memberikan saran. segi tokenisme masyarakat ikut serta dalam kegiatan Musrembang untuk memberikan masukan dan pandangan mereka terkait rencana pembangunan. Namun, masukan yang diberikan hanya bersifat formal dan tidak ditindaklanjuti, sehingga pemerintah lebih memegang kendali terkait program pembangunan yang akan dilaksanakan. Hal ini menunjukkan adanya kebutuhan untuk lebih memperkuat partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, serta memastikan bahwa masukan masyarakat tidak hanya menjadi formalitas belaka tetapi juga dijadikan pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Serta Dalam kekuasaan masyarakat dalam perencanaan pembangunan di kampung getentiri, masyarakat memiliki kekuasaan dalam perencanaan pembangunan. Masyarakat terlibat secara langsung dalam kegiatan pertemuan awal dengan kepala kampung dan musrembang, dan antusias serta penuh semangat dalam memberikan masukan. Hasil musrembang memberikan kewenangan kepada masyarakat untuk ikut serta dalam melaksanakan program pembangunan, namun masih diawasi oleh aparat kampong

Kata kunci: Partisipasi masyarakat; kelompok non partisipasi; Tokenisme; Masyarakat; Musrembang

Abstract

This study aims to determine the participation of the community in Kampung Getentiri, Jair District, Boven Digoel Regency in Development Planning Meetings. Observational techniques, interviews, and documentation were used to collect data. The collected data was analyzed descriptively and qualitatively. The study found that although Musrembang had been conducted and generated enthusiasm among most of the community who are mostly farmers, community participation in Musrembang was still lacking. Inter-community relations were not communicative enough, and there was a lack of active involvement in providing suggestions. In terms of tokenism, the community participated in Musrembang to give their input and opinions on development plans, but the feedback provided was only formal and not followed up, giving the government greater control over development programs. This highlights the need to strengthen community participation in the planning and implementation of development, ensuring that their feedback is not merely a formality but also taken into consideration in decision-making. Furthermore, in terms of the community's power in development planning in Kampung Getentiri, the community has power in development planning. They are involved directly in the initial meetings with the village head and Musrembang and are enthusiastic about providing input. The results of Musrembang give the community authority to participate in implementing development programs, although they are still monitored by the village authorities.

Keywords: Community participation, non-participation groups, Tokenism, Community Empowerment, Musrembang.

PENDAHULUAN

Sebagaimana umumnya, orang-orang ingin hidup dengan sempurna dan lebih baik dari hari ke hari. Istilah-istilah tersebut menggambarkan pemenuhan kebutuhan masyarakat yang menghasilkan situasi yang menguntungkan untuk pengembangan diri dan hubungan sosial yang adil, tanpa harus merasa khawatir akan masa depan. Masalah sosial yang terjadi di masyarakat, terutama di desa, memicu kebutuhan akan perubahan atau perbaikan dalam pembangunan pedesaan. Menurut Adisasmita, pembangunan pedesaan perlu dilakukan dengan cara menyediakan sarana dan prasarana yang memadai serta mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah secara efektif dan stabil (Amanda, 2015). Strategi pembangunan desa bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan semangat masyarakat dalam berpartisipasi dalam pembangunan, dan ciri utama dari pembangunan desa yang ideal adalah partisipasi langsung masyarakat dalam setiap tahap proses pembangunan. Perencanaan pembangunan adalah sebuah proses yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam jangka panjang, oleh karena itu, diperlukan perencanaan yang tepat dan akurat (Irwan et al., 2021).

Menurut (Siti Hajar Irwan Syari Tanjung Yurisna Tanjung Zulfahmi, 2018), partisipasi mengacu pada keterlibatan orang dalam mengidentifikasi masalah dan peluang di tengah masyarakat. Partisipasi masyarakat melibatkan tahapan-tahapan seperti menerima informasi, menanggapi informasi, perencanaan, pelaksanaan, dan pengembangan, dan dapat berperan sebagai input dan output. Output dari partisipasi adalah hasil dari aksi yang dilakukan oleh masyarakat. Dalam konteks pembangunan, partisipasi masyarakat merupakan prasyarat penting untuk mengoptimalkan proses pembangunan. Tanpa adanya partisipasi masyarakat, proses pembangunan akan terhambat. Partisipasi aktif masyarakat berperan sebagai sumber informasi dan data yang akurat mengenai kondisi riil di lapangan terkait kebutuhan dan permasalahan yang ada. Dengan demikian, kebijakan dan kebutuhan pembangunan dapat disesuaikan dengan kondisi yang sebenarnya (Masruri, 2020).

Dalam melaksanakan partisipasi masyarakat, dasar hukumnya terdapat pada UUD 1945 yang menjadikan partisipasi sebagai hak dasar warga negara dan prinsip dasar demokrasi. Konsep partisipasi masyarakat diterapkan oleh Presiden Suharto pada program pembangunan sejak tahun 1966, namun sesuai dengan paradigma pemerintah orde baru yang bersifat sentralistik, kebijakan pembangunan dilakukan secara "top-down". Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional juga menyatakan bahwa sistem perencanaan pembangunan nasional adalah suatu proses perencanaan yang dilakukan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah untuk menghasilkan rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang terintegrasi. Meningkatkan kapasitas dan partisipasi masyarakat kampung sesuai dengan tujuan Nawacita ketiga, yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan kampung (Susanti, 2017).

Proses Undang-undang No 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah memuat pasal 206 yang menjelaskan kewenangan desa dalam mengurus urusan pemerintahan

yang berbasis hak asal usul desa, termasuk urusan yang semula menjadi kewenangan kabupaten/kota yang kemudian dialihkan kepada desa beserta dengan bantuan pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia. Selain itu, urusan pemerintahan lainnya juga dapat diserahkan kepada desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam konteks ini, desa mempunyai wewenang untuk mengatur dan membuat peraturan dengan melibatkan masyarakat desa. Sejak kemerdekaan Indonesia, pembangunan desa selalu menjadi perhatian utama pemerintah, meskipun strategi pembangunan desa sering mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Hal ini ditegaskan dalam undang-undang No 6 tahun 2014 tentang desa yang memuat pasal 78 ayat (2) yang menyebutkan bahwa pembangunan desa mencakup tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan.

Hal Dalam Pasal 79 ayat (1) Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa disebutkan bahwa pemerintah desa harus menyusun rencana pembangunan sesuai dengan kewenangannya dan mengacu pada rencana pembangunan kabupaten/kota. Sementara itu, Pasal 114 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah No. 43 tahun 2014 menjelaskan bahwa rencana pembangunan desa harus disusun berdasarkan kesepakatan dalam musyawarah desa dan musyawarah desa harus dilaksanakan paling lambat pada bulan Juni setiap tahun anggaran. Pasal 114 tersebut juga menegaskan bahwa rencana pembangunan desa harus menjadi panduan bagi pemerintah desa dalam menyusun rancangan RPJM desa, RKP desa, dan daftar usulan RKP desa. Proses perencanaan pembangunan desa melibatkan pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan unsur masyarakat secara partisipatif untuk mengalokasikan sumber daya desa dan mencapai tujuan pembangunan desa. Ini sejalan dengan fokus pemerintah Indonesia pada pembangunan desa sejak masa kemerdekaan, meskipun strategi pembangunan desa mengalami perubahan dari waktu ke waktu (Ariadi, 2019).

Dalam Menurut (Sumardjo dan Saharudin, 2003), partisipasi merujuk pada keikutsertaan seseorang atau kelompok dalam suatu kegiatan yang diarahkan untuk mencapai tujuan yang diinginkan secara sadar oleh pihak yang berkepentingan. Dalam pengembangan masyarakat, partisipasi melibatkan keterlibatan aktif dalam pengambilan keputusan, pelaksanaan, evaluasi, dan penerimaan hasil atau perubahan yang direncanakan untuk mencapai tujuan bersama. Saharuddin dan Sumardjo menjelaskan bahwa seseorang akan berpartisipasi jika memenuhi prasyarat-partisipasi, yaitu peluang, keinginan, dan kemampuan. Peluang berarti adanya kondisi atau lingkungan yang memungkinkan untuk berpartisipasi, sedangkan keinginan berarti dorongan atau motivasi yang mendorong seseorang untuk berbagi dan merasakan manfaat dari keikutsertaannya. Kemampuan, kesadaran, atau keyakinan juga penting, karena seseorang perlu memiliki kemampuan dalam berbagi, seperti tenaga atau pikiran, serta waktu atau sarana/prasarana. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya partisipasi masyarakat dalam merumuskan perencanaan pembangunan bersama dengan pemerintah.

Bagaimanapun juga, terwujudnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan yang telah dirumuskan secara

bersama antara masyarakat dan pemerintah, bergantung pada kesempatan atau ruang yang diberikan oleh pemerintah, baik secara aktif maupun pasif. Selain partisipasi masyarakat, peran pemerintah juga sangat penting dalam proses pembangunan di negara berkembang seperti Indonesia, terutama karena kebanyakan masyarakat masih membutuhkan dukungan dan bantuan untuk terlibat secara efektif dalam pembangunan. Hal ini disebabkan oleh tingkat pendidikan yang masih rendah, sistem politik yang belum memadai, dan kurangnya ruang untuk mengembangkan kemampuan masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan sangat penting untuk memastikan bahwa program tersebut memenuhi kebutuhan dan aspirasi masyarakat yang akan dilayani. Dalam konteks ini, partisipasi masyarakat tidak hanya dianggap sebagai formalitas belaka, tetapi juga sebagai bagian integral dari proses pengambilan keputusan. Dalam sebuah sistem partisipasi yang efektif, masyarakat harus memiliki kesempatan untuk memberikan masukan, saran, dan kritik, serta terlibat dalam proses pelaksanaan program yang telah dirumuskan bersama. Dengan terwujudnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan, akan tercipta sinergi antara masyarakat dan pemerintah dalam mencapai tujuan pembangunan yang lebih baik. Dalam hal ini, masyarakat tidak hanya menjadi penerima program, tetapi juga menjadi bagian dari proses perencanaan dan pelaksanaan program, sehingga masyarakat dapat memahami dan merasakan manfaat dari program tersebut secara langsung. Pemerintah juga dapat memastikan bahwa program pembangunan yang dirancang berdasarkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat, sehingga program tersebut dapat lebih efektif dan berhasil mencapai tujuan yang diinginkan (Uphoff, 1994).

Pemerintah Indonesia terus melakukan berbagai cara untuk meningkatkan kemajuan negara. Salah satu usaha yang dilakukan oleh pemerintah pusat adalah untuk mengurangi disparitas atau ketimpangan dalam pembangunan dan menciptakan keadilan sosial di Indonesia. Pemerintah juga memberikan perhatian khusus terhadap daerah-daerah terluar seperti Papua, dengan harapan dapat meningkatkan investasi dan pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut. Namun, ketimpangan yang terjadi dapat memiliki efek negatif pada pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, partisipasi aktif dari masyarakat, terutama masyarakat Papua, sangat diperlukan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan (Laily, 2015).

Distrik Jair adalah wilayah administratif di Kabupaten Boven Digoel yang sebagian besar dihuni oleh suku Auyu, termasuk di kampung Getentiri. Dalam rangka mendukung perencanaan pembangunan, partisipasi masyarakat di kampung Getentiri sangat dibutuhkan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mempelajari bagaimana partisipasi masyarakat dalam Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrembang) kampung Getentiri pada tahun 2021. Namun, permasalahan yang terdapat dalam musyawarah perencanaan pembangunan di kampung getentiri yaitu, masyarakat yang terlibat dalam kegiatan musyawarah kampung hanya bersifat formalitas saja, masyarakat cenderung pasif ketika terjadi pembahasan program, kemudian disisi lain ada masyarakat yang memberikan masukan dan saran tetapi saran

tersebut tidak di tindak lanjut untuk di jadikan sebagai program sehingga saran tersebut hanya bersifat formalitas saja serta Keterlibatan masyarakat sangat signifikan dalam proses perencanaan pembangunan di kampung getentiri. Dengan berpartisipasi, masyarakat kampung getentiri dapat menyampaikan keinginan dan masalah yang sedang dihadapi kepada pemerintah sehingga pemerintah dapat segera mengatasi permasalahan tersebut. Dengan demikian, kebijakan yang dibuat dapat memberikan dampak yang langsung dirasakan oleh masyarakat. Oleh karena itu dalam penelitian ini sangat penting untuk melihat fenomena yang terjadi dilapangan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini di lakukan di Kabupaten Boven Digoel bertempat pada Kantor Kampung Getentiri. Guna membahas tentang Partisipasi Masyarakat Kampung Getentiri, Distrik Jair, Kabupaten Boven Digoel dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan.. Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti, yaitu dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, dengan cara memberi informasi aktual terkait dengan kondisi hal yang akan diteliti oleh individu. Selanjutnya, penelitian kualitatif memerlukan data yang sifatnya primer dan sekunder. Teknik pengumpulan dan pengolahan data dalam penelitian ini prosesnya dengan melakukan wawancara yang berfokus pada data penelitian yang dibutuhkan. Selain itu, pengumpulan data juga melalui studi pustaka dengan cara dibaca, dicatat, dikutip, kemudian dipahami sesui dengan referensi yang berkaitan dengan isi penelitian . Dapat berupa kumpulan buku, regulasi perundangan, jurnal-jurnal, serta literatur lain yang berhubungan dengan rumusan permasalahan yang dibahas. Adapun proses dalam menganalisa data penelitian melalui beberapa tahap, yaitu reduksi data, penyajian data, dan pengambilan kesimpulan (Lexy, 2008).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Menurut Huneryear dan Heoman yang dikutip oleh (D, 2009) partisipasi mengacu pada keterlibatan mental dan emosional seseorang dalam situasi kelompok, di mana mereka memberikan kontribusi terhadap tujuan kelompok dan berbagi tanggung jawab dengan anggota kelompok lainnya. Sementara itu, Fasli Djalal dan Dedi Supriadi (2001:201-202) memberikan pengertian partisipasi yang sederhana, di mana pembuat keputusan mengajak kelompok atau masyarakat untuk terlibat dalam bentuk memberikan saran dan pendapat, barang, keterampilan, bahan, dan jasa. Partisipasi juga dapat berarti bahwa kelompok mengenali masalah mereka sendiri, mengevaluasi pilihan mereka, membuat keputusan, dan menyelesaikan masalah tersebut. Partisipasi masyarakat menurut (Sumarto dan Hetifa Sj, 2003) adalah proses ketika warga sebagai individu maupun kelompok social dan organisasi, mengambil peran serta ikut mempengaruhi proses perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan kebijakan yang langsung mempengaruhi kehidupan mereka. Hasil dan pembahasan dalam penelitian ini di lihat dari 3 indikator partisipasi masyarakat sebagai berikut.

Kelompok Non Partisipasi

Dalam kelompok non partisipasi Masyarakat hanya sebagai objek yang dimanipulasi oleh pihak yang berkuasa. Partisipasi masyarakat tidak ada sama sekali dan Masyarakat hanya dipandang sebagai individu yang memerlukan penanganan

khusus seperti layanan kesehatan atau sosial. Partisipasi masyarakat masih sangat minim. Kegiatan partisipasi yang terjadi sebenarnya merupakan distorsi dari partisipasi yang sebenarnya diinginkan. Tujuan sebenarnya bukan untuk mendukung partisipasi masyarakat dalam pembuatan dan pelaksanaan keputusan, melainkan hanya untuk memenuhi keinginan pihak berkuasa untuk mengedukasi dan menyenangkan peserta partisipasi. Tingkatan partisipasi yang terjadi hanya mencapai level manipulasi dan terapi (Duaadi, 2013).

Hasil Penelitian menyebutkan bahwa Musrembang yang telah dilakukan memberikan antusias masyarakat dalam menyalurkan pendapat dan usulan-usulan mereka. Hal ini terjadi karena sebagian besar masyarakat Kampung getentiri adalah petani.tetapi dalam hal ini partisipasi Masyarakat kampung getentiri kurang partisipatif terlibat dalam kegiatan musrembang serta hubungan antar masyarakat mendukung terlaksananya partisipasi masyarakat kurang komunikatif. Dalam hal ini partisipasi masyarakat getentiri terlihat ikut serta dalam kegiatan musrembang tingkat kampung. Masyarakat ikut serta namun belum terlihat keaktifan dalam memberikan saran.

Tokenisme

Dalam Indicator tokenisme menjelaskan bahwa Memberikan informasi kepada warga tentang hak, kemampuan dan pilihan merupakan tahapan yang penting untuk mendapatkan legitimasi dari partisipasi warga. Masyarakat diberikan informasi tentang program atau kebijakan yang akan dilaksanakan, namun tidak diberikan kesempatan untuk memberikan tanggapan atau masukan. Kemudian, Masyarakat diberikan kesempatan untuk memberikan masukan dan pendapat, namun keputusan akhir tetap berada di tangan pihak yang berkuasa. Serta Masyarakat secara aktif terlibat dalam proses pengambilan keputusan dan memiliki peran yang sama dengan pihak yang berkuasa. Pihak berkuasa atau pemerintah harus menunjuk sejumlah individu dari masyarakat yang terpengaruh untuk menjadi anggota badan publik tertentu, yang memberikan mereka akses terbatas pada proses pengambilan keputusan. Meskipun usulan dari masyarakat tetap diperhatikan, namun kedudukan dan jumlah anggota dari pemerintah lebih dominan sehingga masyarakat tidak mampu mengambil keputusan. Dalam konsultasi, masyarakat tidak hanya diberitahu tetapi juga diundang untuk berbagi pendapat, meskipun tidak ada jaminan bahwa pendapat yang dikemukakan akan menjadi pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Metode yang sering digunakan adalah survei tentang pandangan masyarakat atau pertemuan lingkungan masyarakat dan dengar pendapat dengan masyarakat. Sedangkan pada tahap informing, pemegang kekuasaan hanya memberikan informasi kepada masyarakat terkait proposal kegiatan, tanpa memberdayakan masyarakat untuk mempengaruhi hasil. Informasi yang diberikan dapat berupa hak, tanggung jawab, dan pilihan-pilihan, namun tidak ada umpan balik atau kekuatan untuk negosiasi dari masyarakat (Wijaksono, 2013).

Berdasarkan hasil penelitian keseluruhan pada indikator Tokenisme kampung getentiri distrik jair kabupaten Bovendigoel masyarakat ikut serta untuk mengikuti kegiatan Musrembang, dalam kegiatan itu masyarakat berpartisipasi untuk memberikan masukan terkait rencana pembangunan, kemudian masyarakat juga memberikan

pandangan dan pendapat mereka terkait rencana pembangunan, namun seluruh masukan yang diberikan itu bersifat formal dalam kegiatan saja dan tidak ditindak lanjut, kemudian pemerintah lebih memegang kendali terkait rencana program yang akan dilaksanakan.

Kekuasaan Masyarakat

Kriteria Partisipasi Pada tahap ini masyarakat mempunyai ruang dalam suatu program pembangunan. Tahap selanjutnya, mulai terjadi pelimpahan wewenang dari pemerintah kepada masyarakat (pendelegasian kekuasaan dimana masyarakat diberi sebagian atau seluruh program). Terakhir, masyarakat dapat mengontrol terkait program-programnya (sepenuhnya dikuasai oleh masyarakat). Pada tahap terakhir inilah oleh Arnstein disebut dengan partisipasi atau kekuasaan masyarakat. Dari uraian diatas, menjelaskan bahwasannya peran masyarakat cukup penting terkait partisipasinya dalam proses perencanaan pembangunan. kekuasaan rakyat, yang terdiri dari tiga tingkatan yaitu Kemitraan atau Partnership, pendelegasian atau power delegation, dan partisipasi, mencakup citizen control sebagai tingkat partisipasi paling kuat. Kemitraan mencakup partisipasi yang seimbang antara pemerintah dan masyarakat dimana keduanya dapat saling memberikan masukan. Pendelegasian pemerintah memberikan kepercayaan kepada masyarakat untuk ikut dalam pengambilan keputusan. Puncak dari tangga partisipasi tercapai ketika masyarakat memiliki kontrol penuh dan dapat mengambil keputusan secara independen (Ramdani & Habibi, 2017).

Berdasarkan hasil penelitian di temukan bahwa kekuasaan masyarakat dalam perencanaan pembangunan di kampung getentiri, masyarakat terlibat langsung dalam kegiatan pertemuan awal dengan kepala kampung kemudian di ikutsertakan dalam kegiatan musrembang, masyarakat sangat antusias dengan penuh semangat, selanjutnya dari hasil musrembang dilakukan masyarakat juga memiliki kewenangan untuk ikut serta dalam melaksanakan program namun masih tetap di kawal oleh pihak aparat kampung, kemudian untuk control masyarakat sendiri terlihat sudah nyata dan dilakukan langsung oleh masyarakat namun masih di dominasi oleh aparat kampung getentiri sendiri.

KESIMPULAN

Partisipasi Dari hasil penelitian, disimpulkan bahwa meskipun Musrembang telah dilakukan dan memberikan antusiasme kepada sebagian besar masyarakat Kampung Getentiri yang mayoritas sebagai petani, namun partisipasi masyarakat dalam kegiatan Musrembang masih kurang. Hubungan antar masyarakat kurang komunikatif dan belum terlihat keaktifan dalam memberikan saran, sehingga perlu adanya upaya untuk memperkuat partisipasi masyarakat dalam Musrembang agar lebih efektif dalam menyalurkan pendapat dan usulan. Kemudian masyarakat ikut serta dalam kegiatan Musrembang untuk memberikan masukan dan pandangan mereka terkait rencana pembangunan. Namun, masukan yang diberikan hanya bersifat formal dan tidak ditindaklanjuti, sehingga pemerintah lebih memegang kendali terkait program pembangunan yang akan dilaksanakan. Hal ini menunjukkan adanya kebutuhan untuk lebih memperkuat partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan

pembangunan, serta memastikan bahwa masukan masyarakat tidak hanya menjadi formalitas belaka tetapi juga dijadikan pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Serta di Kampung Getentiri, masyarakat memiliki kekuasaan dalam perencanaan pembangunan. Masyarakat terlibat secara langsung dalam kegiatan pertemuan awal dengan kepala kampung dan musrembang, dan antusias serta penuh semangat dalam memberikan masukan. Hasil musrembang memberikan kewenangan kepada masyarakat untuk ikut serta dalam melaksanakan program pembangunan, namun masih diawasi oleh aparat kampung. Masyarakat sudah memiliki kontrol dalam pelaksanaan program, namun dominasi aparat kampung masih terlihat jelas.

DAFTAR PUSTAKA

- Amanda, H. W. (2015). Strategi pembangunan desa dalam meningkatkan Pendapatan asli desa melalui Badan Usaha Milik Desa (Bumdes): Studi pada badan pengelola air minum (Bpam) Di Desa Ketapanrame Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto. *Jurnal Publika*, 3(5), 7–12. <http://jurnalmahasiswa.unesa.ac.id/index.php/publika/article/view/11820>
- Ariadi, A. (2019). Perencanaan Pembangunan Desa. *Meraja Journal*, 2(2), 135–147. <https://merajajournal.com/index.php/mrj/article/download/54/45>
- D, S. I. A. (2009). *Desentralisasi dan Partisipasi dalam Pendidikan*. UNY Press.
- Duadji, N. (2013). Partisipasi Publik dalam Pengambilan Keputusan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung. *Jurnal Bina Praja*, 05(03), 197–204. <https://doi.org/10.21787/jbp.05.2013.197-204>
- Irwan, I., Latif, A., & Mustanir, A. (2021). Pendekatan Partisipatif Dalam Perencanaan Pembangunan di Kabupaten Sidenreng Rappang. *GEOGRAPHY Jurnal Kajian Penelitian Dan Pengembangan Pendidikan*, 9(2), 137–151. <https://journal.ummat.ac.id/index.php/geography/article/view/5153>
- Laily, E. I. N. (2015). Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan partisipatif). *Kebijakan Dan Manajemen Publik*, 3(2), 186–190.
- Lexy, J. M. (2008). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.
- Masruri. (2020). Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Di Desa Bumi Rahayu Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 1(3), 1171–1180.
- Ramdani, D. F., & Habibi, F. (2017). Pengaruh Partisipasi Masyarakat Dalam Mendorong Program Smart City di Kota Bandung. *Prosiding Seminar Nasional Riset Terapan / SENASSET*, 0(0), 125–129. <http://ejurnal.lppmunsera.org/index.php/senasset/article/view/436/462>
- Siti Hajar Irwan Syari Tanjung Yurisna Tanjung Zulfahmi. (2018). *Pemberdayaan Dan Partisipasi Masyarakat Pesisir* (Vol. 4, Issue 1). LEMBAGA PENELITIAN DAN PENULISAN ILMIAH AQLI.
- Sumardjo dan Saharudin. (2003). *Metode-metode Partisipatif dalam Pengembangan Masyarakat*. Jurusan Ilmu-ilmu Sosial Ekonomi Faperta, IPB.
- Sumarto dan Hetifa Sj. (2003). *Inovasi, Partisipasi dan Good governance*. Yayasan Obor Indonesia.
- Susanti, M. H. (2017). Peran Pendamping Desa Dalam Mendorong Prakarsa Dan Partisipasi Masyarakat Menuju Desa Mandiri Di Desa Gonoharjo Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal. *Integralistik*, 1, 29–39.
- Uphoff, N. T. (1994). *J Learning from Gal Oya, possibilities for participatory development and post-Newtonian social science*. *Economic Development &*

- Cultural Change* (Book Secti). The University of Chicago Press.
- Wijaksono, S. (2013). Pengaruh Lama Tinggal dalam Pengelolaan Lingkungan Permukiman. *Journal ComTech BINUS*, 4(1), 24–32.